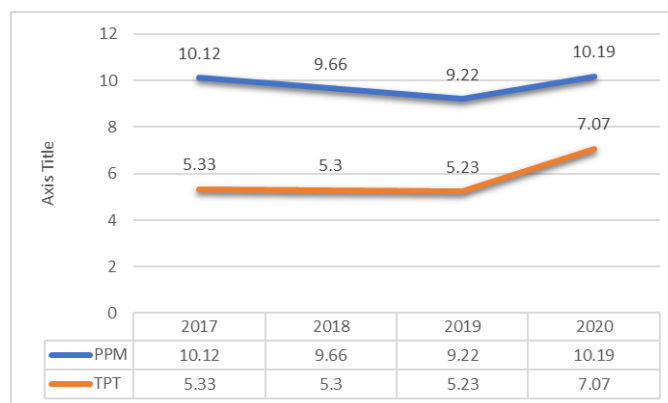


BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hadirnya Pandemi Covid-19 membawa dampak negatif terhadap seluruh aspek kehidupan termasuk aspek perekonomian di seluruh dunia. Konteks di Indonesia, pandemi Covid-19 membawa Indonesia memasuki krisis ekonomi yang ditandai dengan meningkatnya penduduk miskin (Suryahadi, Izzati, et al., 2020). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), persentase penduduk miskin di Indonesia pada tahun 2018-2019 mengalami penurunan, yakni jumlah penduduk miskin pada tahun 2018 sebesar 9.66% dan 2019 menurun sebesar 9.22%. Namun adanya pandemi Covid-19 di awal tahun 2020 membawa implikasi peningkatan penduduk miskin di Indonesia sebesar 10.19%. Data meningkatnya penduduk miskin turut mempengaruhi meningkatnya jumlah pengangguran terbuka (TPT) di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



Gambar 1. Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran Indonesia

Sumber Badan Pusat Statistik, 2022

Berdasarkan data diatas, diketahui bahwa meningkatnya presentasi penduduk miskin (PPM) turut mempengaruhi meningkatnya jumlah pengangguran terbuka (TPT) di Indonesia di tahun 2020. Peningkatan tersebut menjadikan perekonomian Indonesia telah memasuki krisis sejak triwulan kedua (Suryahadi, Al Izzati, et al.,2020). Terdapat dua faktor yang menjadi alasan utama di balik krisis ini: Pertama, semakin banyak populasi yang terinfeksi Covid-19 (termasuk populasi produktif). Situasi ini mengurangi kemampuan rumah tangga mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Kedua, pembatasan sosial yang diterapkan pemerintah berdampak negatif terhadap perekonomian yang tidak beroperasi dari kapasitas optimalnya karena sebagian usaha harus ditutup dan sebagian pekerja terpaksa dirumahkan (Suryahadi, Izzati, et al., 2020).

Meningkatnya angka kemiskinan dan pengangguran akibat adanya pandemi Covid-19 dirasakan juga diberbagai daerah di Indonesia salah satunya Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah. Persoalan kemiskinan masih menjadi pekerjaan rumah bagi Pemerintah Kabupaten Purbalingga. Sebanyak 145.000 warga Purbalingga masuk dalam kategori miskin ekstrem atau masyarakat tidak mampu dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, air bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan dan akses informasi (Utomo et al., 2014). Kendati demikian secara persentase jumlah penduduk miskin di Kabupaten Purbalingga sempat mengalami penurunan pada tahun 2017 sampai dengan 2019. Namun adanya pandemi Covid-19 angka kemiskinan di Kabupaten Purbalingga meningkat kembali. Data tersebut dapat dilihat pada tabel jumlah penduduk miskin di Kabupaten Purbalingga dibawah ini:

Tabel 1. Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Purbalingga

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (dalam satuan ribu)	Persentase
2017	171,90	18,80
2018	144,16	15,62
2019	140,07	15,03
2020	149,50	15,90
2021	153,10	16,24

Sumber. Badan Pusat Statistik Kabupaten Purbalingga, 2022

Data pada tabel diatas menunjukkan adanya peningkatan kemiskinan di Kabupaten Purbalingga akibat Pandemi Covid-19 di awal tahun 2020. Sebelum tahun 2020, yakni 2017 hingga 2019, angka kemiskinan sempat mengalami penurunan namun meningkat dengan persentase 15.90 di tahun 2020 dan meningkat lagi di tahun berikutnya sebesar 16.24%. Peningkatan angka kemiskinan ini menjadikan Kabupaten Purbalingga masuk lima besar daerah dengan warga kategori miskin ekstrim terbanyak di Jawa Tengah (Utomo et al., 2014). Berdasarkan permasalahan tersebut, Pemerintah Kabupaten Purbalingga memprioritaskan pemulihan ekonomi pasca pandemi salah satunya khususnya dari sisi perlindungan sosial dan ekonomi melalui kebijakan penguatan Program Keluarga Harapan (PKH) (Utomo et al., 2014).

Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program bantuan yang bertujuan untuk menanggulangi angka kemiskinan di Indonesia. PKH diberikan kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) yang memenuhi syarat yang sudah ditetapkan. Program ini dimaksudkan agar dapat

meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat miskin (Saragi et al., 2021). Tujuan utama pemberian bantuan PKH yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia pada masyarakat miskin dan mengurangi angka kemiskinan di Indonesia (Beni & Manggu, 2020). Sedangkan menurut Sasmito & Nawangsari (2019) tujuan khusus program ini adalah meningkatkan pendidikan RTSM, meningkatkan kualitas gizi dan nutrisi RTSM, meningkatkan fasilitas kesehatan RTSM dan meningkatkan kondisi ekonomi RTSM.

PKH diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan. Secara pengertian, PKH merupakan program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, diolah oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. Program ini telah terdistribusikan diberbagai daerah di Indonesia dengan tujuan jangka pendek mengurangi beban keluarga dan secara jangka panjang diharapkan dapat memutus mata rantai kemiskinan antar generasi, sehingga generasi berikutnya dapat keluar dari perangkap kemiskinan (Sasmito & Nawangsari, 2019).

Mekanisme bantuan yang diberikan kepada keluarga miskin sebagai keluarga penerima manfaat dikenal efektif dalam menanggulangi kemiskinan yang dihadapi diberbagai negara didunia, terutama masalah kemiskinan kronis (Fitriawati et al., 2019). Melalui PKH, keluarga miskin didorong untuk memiliki akses dan memanfaatkan pelayanan sosial dasar kesehatan, pendidikan, pangan dan gizi, perawatan dan pendampingan, termasuk akses terhadap berbagai program perlindungan sosial lainnya (Utomo et al., 2014). Diberbagai daerah yang ditetapkan memiliki status

miskin ekstrim seperti di Kabupaten Purbalingga, program ini diharapkan dapat mengurangi beban keluarga dengan mengurangi beban pengeluaran rumah tangga, terutama rumah tangga miskin dalam situasi krisis diberbagai daerah pasca pandemi Covid-19 (Rizayani et al., 2022). Kendati demikian, pelaksanaan program PKH ini perlu dipantau dan dievaluasi untuk mengetahui ke-efektifitasannya dalam mengurangi beban keluarga miskin dan kelompok rentan lainnya di Kabupaten Purbalingga.

Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis lebih dalam terkait efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai upaya menanggulangi kemiskinan pasca pandemi Covid-19 di Kabupaten Purbalingga. Berdasarkan hal tersebut, diperlukan landasan teori untuk memudahkan penelitian menganalisis fenomena lapangan yang ditemukan. Adapun penelitian ini menggunakan teori efektivitas (Steers, 2003) sebagai landasan teori yang memiliki tiga indikator analisis, diantaranya: pertama, sebagai landasan teori yang memiliki tiga indikator analisis, diantaranya: Pertama, sosialisasi program sebagai upaya pendistribusian informasi kepada kelompok manfaat. Kedua, ketepatan pelaksanaan program sebagai bentuk kesesuaian antara tujuan dan pelaksanaan program. Ketiga, pemantauan program sebagai bentuk monitoring terhadap pelaksanaan program.

Kabupaten Purbalingga dipilih menjadi lokasi penelitian dengan justifikasisebagai salah satu daerah di Jawa Tengah yang memiliki tingkat kemiskinan ekstrim dengan persentase 16.24%. Hadirnya program PKH yang bertujuan untuk mengurangi beban keluarga miskin dan kelompok rentan lainnya di Kabupaten Purbalingga menjadi menarik untuk dilakukan eksplorasi lebih dalam khususnya terhadap

efektifitas program PKH yang telah diterapkan. Sehingga hasil penelitian dapat mengetahui dan mengevaluasi efektifitas PKH sebagai salah satu program pengentas kemiskinan di Kabupaten Purbalingga.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana efektifitas program keluarga harapan (PKH) dalam menanggulangi kemiskinan pasca Pandemi Covid-19 di Kabupaten Purbalingga?"

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui efektifitas program keluarga harapan (PKH) dalam menanggulangi kemiskinan pasca Pandemi Covid-19 di Kabupaten Purbalingga

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Menambah referensi khususnya dalam bidang ilmu kebijakan publik dalam menanggulangi kemiskinan daerah. Sehingga sejumlah penelitian serupa yang akan dilakukan dapat mengembangkan penelitian-penelitian yang relevan.

2. Manfaat Praktis

Memberikan evaluasi khususnya terhadap pemangku kebijakan Kabupaten Purbalingga dalam menanggulangi kemiskinan pasca pandemi Covid-19 melalui implementasi program keluarga harapan.

E. Tinjauan Pustaka

Berbagai penelitian terdahulu telah meletakkan perhatian penelitian nya pada penanggulangan kemiskinan pasca pandemi Covid-19. Hal ini menandakan bahwa penelitian terkait penanggulangan kemiskinan di berbagai daerah di Indonesia telah banyak dilakukan oleh penelitian terdahulu. Namun perlu adanya analisis dari sejumlah penelitian

terdahulu untuk mengetahui posisi penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan diangkat sehingga diharapkan dapat mengisi kekosongan (GAP) dari penelitian yang sudah ada. Penelusuran penelitian terdahulu dalam tinjauan pustaka ini dilakukan dengan menganalisis penelitian terdahulu berupa artikel ilmiah yang terbit lima tahun terakhir yakni 2018-2023. Adapun hasil penelusuran penelitian terdahulu dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2. Hasil Analisis Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian	Peneliti	Hasil Penelitian	Kelemahan Penelitian	Link Jurnal
1	Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan di Kota Batu	(Citra Ayu Rahmada, 2019)	Implementasi PKH dalam upaya pengentasan kemiskinan pada Dinas Sosial Pemerintahan Kota Batu telah berjalan dengan baik dan lancar. Komunikasi terjalin secara baik dengan pendamping PKH dalam upaya mengentaskan kemiskinan. Dinas Sosial memberikan tugas pada pendamping PKH untuk membantu peserta PKH dalam memberikan penyuluhan terkait syarat dan ketentuan wajib yang harus dipenuhi peserta PKH.	Hasil penelitian menjelaskan implementasi PKH berjalan baik dan lancar namun minim data yang mendukung Keberhasilan implementasi tersebut. Sehingga hasil penelitian belum dapat diperkuat dengan bukti data lapangan.	Volume 13, Nomor 5, Tahun 2019 http://jim.unisma.ac.id/index.php/rpp/article/view/4367
2	Pelaksanaan Program Keluarga Harapan dalam Meningkatkan	(Utomo et al., 2014)	Hasil penelitian diketahui, dalam pelaksanaannya pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) yang	Hasil evaluasi dalam penelitian ini tidak memberikan data adanya penurunan penerima PKH	Volume 2, Nomor 1, Tahun 2014

	n Kualitas Hidup Rumah Tangga Miskin: Studi Pada Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan Kecamatan Purwosari, Kabupaten Kediri		dilakukan di Kecamatan Purwoasri bertujuan untuk memberikan bukti nyata dalam pencapaian tujuan. Hasil Evaluasi membuktikan bahwa penerima PKH setiap tahunnya mengalami penurunan	setiap tahunnya. Sehingga hasil penelitian belum dapat diperkuat dengan bukti data lapangan.	http://admission.inistrasi.pu.blik.studentjournal.uib.ac.id/index.php/jap/article/view/333
3	Sistem Informasi Program Keluarga Harapan: Studi Kasus Kecamatan Kosambi Tanggerang	(Fitriawati et al., 2019)	Penelitian ini menggunakan tabel elisitasi dalam mengalisa sistem yang dibutuhkan pengguna dan menggunakan Unified Modelling Language (UML) dalam rangka visualisasi, spesifikasi, konstruksi dan pendokumentasian sistem yang dikembangkan. Sistem program keluarga harapan dikembangkan menggunakan bahasa PHP (Hypertext Preprocessor) dengan database MySQL.	Hasil dari penelitian ini tidak mendeskripsikan tujuannya seperti mempermudah staf kelurahan dalam melakukan pengelolaan data warga sehingga pimpinan dapat mengambil kebijakan penyaluran dana bantuan program “Keluarga Harapan” dengan tepat dan akurat.	Volume 3, Nomor 2, Tahun 2019 https://jurnal.umt.ac.id/index.php/jika/article/view/2095
4	Kebijakan Pengentasan Kemiskinan Melalui Program Keluarga Harapan di	(Rizayani et al., 2022)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa telah terjadi peningkatan berbagai sektor penting pada masyarakat kota Banjarbaru melalui PKH, seperti	Minim data yang mendukung keberhasilan implementasi tersebut. Sehingga hasil penelitian belum dapat diperkuat	Volume 2, Nomor 1, Tahun 2022 https://ppj.p.uilm.ac.id

	Kota Banjarbaru		peningkatan bidang ekonomi, kesehatan, sosial hingga pendidikan. PKH merupakan diantara kebijakan bidang ekonomi yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat kota Banjarbaru.	dengan bukti data lapangan	/journals/index.php/pakis/article/view/5209
5	Analisis Pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Desa Kota Rantang Kecamatan Hampan Perak	(Saragi et al., 2021)	Hasil penelitian mengungkapkan bahwa penetapan peserta PKH dilakukan berdasarkan data yang sudah ada di sistem Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Namun tetap dilakukan pengecekan kebenaran kondisi peserta hingga diverifikasi ulang oleh Kementerian sosial. Sedangkan kendala yang terdapat dalam pelaksanaan yaitu masih sulitnya mengumpulkan semua peserta secara bersama- sama setiap bulan untuk pengecekan dan pembinaan.	Penelitian tidak memiliki landasan teori sehingga hasil pembahasan terlalu meluas atau general dan tidak terfokus.	Volume 8, Nomor 1, Tahun 2021 https://stia-binataruna.e-journal.id/PUBLIK/article/view/150
6	Efektivitas Program Keluarga Harapan di Desa Sumber Kejayan Kecamatan	(Infatih et al., 2019)	Persentase hasil penelitian pada aspek input menunjukkan hasil sebesar 68,3%, aspek proses sebesar 84% dan output bidang pendidikan	Penelitian tidak memiliki landasan teori sehingga hasil pembahasan terlalu meluas atau general dan tidak terfokus.	Volume 14, Nomor 2, Tahun 2021 https://journal.unnes.ac.id/nju/in

	<p>Mayang Kabupaten Jember</p>		<p>untuk kriteria anak usia sekolah didaftarkan di satuan pendidikan sebesar 99% dan persentase kehadiran anak usia sekolah sebesar 88% serta kesejahteraan sosial sebesar 84%. Sedangkan pada aspek output bidang kesehatan pada kategori KPM usia 1-5 tahun belum efektif. Hal itu dikarenakan dari 8 (delapan) kriteria terdapat 2 (dua) kriteria responden yang memiliki anak usia 0-11 bulan yang tidak sesuai dengan persentase yang diharapkan. Kriteria tersebut adalah frekuensi Ibu yang kurang dalam memeriksakan kesehatan ke fasilitas kesehatan pada masanifas sebesar 44% dan kriteria tentang frekuensi yang kurang pada pemeriksaan kesehatan bayi 0-1 bulan difasilitas kesehatan sebesar 32%. Kemudian indikator output PKH yang belum efektif juga terdapat pada pola makan anak usia 1-5 tahun dalam kesehariannya yang belum memenuhi 4</p>		<p>dex.php/ijak/article/view/27697</p>
--	--	--	---	--	---

			(empat) sehat 5 (lima) sempurna yaitu sebesar 40%		
7	Efektivitas Program Keluarga Harapan dalam Penanggulangan Kemiskinan di Perbatasan: Studi Kasus Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang Kalimantan Barat	(Beni & Manggu, 2020)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa program keluarga harapan sangat efektif dalam mengentaskan kemiskinan di daerah perbatasan yang terlihat dari menurunnya angka putus sekolah, tingginya partisipasi mengunjungi fasilitas kesehatan baik untuk kegiatan posyandu maupun pemeriksaan kesehatan serta kemampuan memenuhi kebutuhan pokok yang bersumber dari penyalangan dana bantuan yang diterima. Walaupun, dari total penduduk miskin di Kecamatan Jagoi Babang berjumlah 882 Kepala Keluarga, sementara Keluarga Penerima Manfaat di Kecamatan Jagoi Babang per tahun 2018 sebanyak 357 orang, artinya masih ada 527 keluarga miskin yang belum mendapatkan bantuan. Sebagai saran kepada pemerintah, sebaiknya dilakukan	Hasil dari penelitian ini tidak mendeskripsikan tujuannya seperti mempermudah staf kelurahan dalam melakukan pengelolaan data warga sehingga pimpinan dapat mengambil kebijakan penyalangan dana bantuan program “Keluarga Harapan” dengan tepat dan akurat.	Volume 17, Nomor 1, Tahun 2019 https://jiana.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIANA/article/view/7867

			<p>pembaharuan data secara terus menerus dalam basis data terpadu dari data yang digunakan tahun 2015 serta adanya program pemberdayaan bagi masyarakat perbatasan dengan mendirikan Sekolah Lapangan yang dapat meningkatkan Soft Skill dan Hard Skill dalam ilmu Kewirausahaan agar masyarakat Tidak selalu berorientasi untuk bekerja di Malaysia</p>		
8	<p>Efektifitas Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga: Studi Kasus di Desa Margajaya Kecamatan Ngamprah KBB</p>	(Luthfi, 2019)	<p>Berdasarkan hasil penelitian melalui observasi, wawancara dan kuesioner menunjukkan bahwa secara umum efektifitas pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Margajaya Kecamatan Ngamprah KBB ini sudah berjalan dengan cukup baik. Ini dapat dilihat dari setiap tahapan proses pelaksanaannya yang berjalan lancar. Apabila dilihat dari keadaan penerima bantuan PKH tersebut mereka menggunakannya untuk membantu kondisi sosial dan</p>	<p>Penelitian tidak memiliki landasan teori sehingga hasil pembahasan terlalu meluas atau general dan tidak terfokus.</p>	<p>Volume 2, Nomor 1, Tahun 2019</p> <p>https://journal.ikipsiliwangi.ac.id/index.php/comm-edu/article/view/2442</p>

			pendidikan anak-anak Keluarga Miskin, membantu biaya kesehatan & gizi ibu hamil, ibu nifas, dan anak di bawah 6 tahun dari Keluarga Miskin, serta menyadarkan peserta PKH akan pentingnya layanan pendidikan dan Posyandu, sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat.		
9	Analisis Pengaruh Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Kemiskinan di Kabupaten Minahasa Tenggara	(Gultom et al., 2020)	Penelitian menunjukkan bahwa Bantuan Pangan Non Tunai berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program Keluarga Harapan berpengaruh positif terhadap kemiskinan akan tetapi tidak signifikan secara statistik.	Hasil evaluasi dalam penelitian ini tidak memberikan data adanya penurunan penerima PKH setiap tahunnya. Sehingga hasil penelitian belum dapat diperkuat dengan bukti data lapangan	Volume 21, Nomor 2, Tahun 2020 https://ejournal.unsra.t.ac.id/v3/index.php/ipekd/article/view/32812/31003
10	Rekomendasi Penerima Bantuan Program Keluarga Harapan	(Sasmita et al., 2021)	Dari hasil perhitungan metode SAW menghasilkan nilai yang dapat dijadikan rekomendasi penerima bantuan yang layak dan tidak layak berdasarkan hasil perhitungan nilai alternatif serta beberapa kriteria dan bobot yang ditentukan	Hasil penelitian menjelaskan implementasi PKH berjalan baik dan lancar namun minim data yang mendukung keberhasilan implementasi tersebut. Sehingga hasil penelitian belum dapat diperkuat dengan bukti data lapangan.	Volume 3, Nomor 2 Tahun 2021 https://ejournal.ung.ac.id/index.php/jjeee/article/view/10943

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa sejumlah penelitian terdahulu memfokuskan pembahasannya pada: 1. Implementasi program keluarga harapan, 2. Evaluasi program PKH, 3. Proses implementasi program PKH, 4. Pengurangan angka kemiskinan dengan metode kuantitatif pasca diberlakukannya program dan 5. Pengaruh positif pasca implementasi program PKH. Meski penelitian terdahulu telah meletakkan fokus pembahasannya pada implementasi program PKH, namun minim sekali dari penelitian yang sudah ada mengaitkan landasan teori sebagai analisis data temuan lapangan. Sehingga penelitian yang sudah ada masih terlalu luas dan tidak terfokus. Selain itu, berbagai penelitian telah menarik kesimpulan bahwa program PKH dinilai efektif dalam menanggulangi kemiskinan di daerah, namun dari berbagai penelitian yang ada tidak memberikan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas implementasi program. Berdasarkan hal inilah yang menjadi kekosongan atau gap dari penelitian yang sudah ada.

Oleh sebab itu, penelitian yang akan dilakukan bertujuan untuk mengisi kekosongan penelitian terdahulu dengan menganalisis lebih dalam terkait efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai upaya menanggulangi kemiskinan pasca pandemi Covid-19 di Kabupaten Purbalingga. Sehingga hasil penelitian dapat mengetahui dan mengevaluasi efektivitas bantuan sosial seperti PKH dalam menanggulangi kemiskinan di Kabupaten Purbalingga. Berdasarkan hal tersebut, diperlukan landasan teori untuk memudahkan penelitian menganalisis fenomena lapangan yang ditemukan. Adapun penelitian ini menggunakan teori efektivitas sebagai landasan teori yang memiliki tiga indikator analisis, diantaranya: pertama, pencapaian tujuan, yaitu seluruh usaha pencapaian tujuan harus dipandang sebagai

proses; kedua, integrasi yaitu tingkat kesanggupan organisasi dalam melaksanakan sosialisasi, pengembangan konsesus, dan komunikasi terhadap organisasi lain integrasi dan ketiga, adaptasi, yaitu kemampuan dalam menyesuaikan organisasi dengan lingkungan.

F. Kerangka Dasar Teori

1. Kemiskinan

Pengertian terkait kemiskinan dapat dilihat dari berbagai penjelasan, seperti Soetrisno (1995) yang menjelaskan bahwa kemiskinan merupakan situasi yang serba terbatas dan terjadi bukan atas kehendak orang yang bersangkutan. Moeljarto (1995) memberikan penjelasan bahwa masyarakat dikatakan miskin apabila ditandai oleh rendahnya pendidikan, produktivitas kerja, pendapatan, kesehatan dan gizi serta kesejahteraan hidupnya yang menunjukkan lingkaran ketidakberdayaan. Pernyataan serupa dijelaskan oleh Hikmat (2004) yang menjelaskan bahwa kemiskinan disebabkan oleh terbatasnya sumber daya manusia yang ada seperti minimnya jalur pendidikan formal maupun non formal yang menimbulkan konsekuensi terhadap rendahnya pendidikan informal.

Penjelasan berbeda justru dikemukakan oleh Kamaludin (1999) yang menyatakan bahwa masyarakat miskin memiliki kemampuan yang relatif baik untuk memperoleh sumber melalui kesempatan yang ada. Kendati demikian bantuan dari luar terkadang dipergunakan, tetapi tidak begitu saja dapat dipastikan sehingga masyarakat bergantung pada dukungan dari luar. Namun dalam penjelasan ini tidak dijelaskan secara detail kemampuan seperti apa yang dilakukan oleh masyarakat miskin.

Pendekatan pemberdayaan yang datang dari luar pun terkadang dianggap tidak berhasil karena tidak ada masyarakat yang dapat hidup dan berkembang bila terisolasi dari kelompok masyarakat lainnya. Pengisolasian ini menimbulkan sikap pasif, bahkan keadaan menjadi semakin miskin.

Lebih lanjut, seperti merangkum berbagai penjelasan kemiskinan sebelumnya, penjelasan Saiffudin (2003) mengemukakan lima karakteristik penduduk dapat dikatakan miskin, diantaranya: 1. Tidak memiliki faktor produksi sendiri, 2. Tidak mempunyai kemungkinan untuk memperoleh aset produk dengan kekuatan sendiri. 3. Tidak pendidikan pada umumnya lebih rendah. 4. Banyak diantara mereka yang tidak mempunyai fasilitas. 5. Diantara mereka berusia relatif muda dan tidak mempunyai keterampilan atau pendidikan yang memadai. Oleh sebab itu Moeljarto (1995) menjelaskan pengentasan kemiskinan tidak hanya dilakukan dengan mengutamakan pembangunan aspek ekonomi, melainkan harus mengutamakan aspek pendidikan secara universal bagi kepentingan diri orang miskin dengan tujuan meningkatkan keterampilan dan kehidupan sosial ekonominya.

Senada dengan itu, Evers & Hans (1988) menyatakan bahwa tidak sedikit negara memang terjadi kenaikan tingkat kesejahteraan masyarakat yang diukur dari pendapatan perkapitanya, tetapi itu hanya dapat dinikmati oleh sebagian kecil masyarakatnya, sedangkan sebagian besar masyarakat miskin kurang memperoleh manfaat apa-apa bahkan sangat dirugikan. Untuk memecahkan masalah ini, perlu kebijaksanaan yang tepat dengan mengidentifikasi golongan masyarakat yang

hidup dibawah garis kemiskinan. Umumnya, suatu keadaan disebut miskin apabila ditandai dengan kekurangan atau ketidakmampuan memenuhi tingkat kebutuhan dasar manusia.

Penjelasan Luthfi (2019), kemiskinan terjadi apabila tidak terpenuhinya kebuthan dasar manusia yang mencakup kebutuhan primer dan sekunder. Kebutuhan primer berupa miskinnya aset pengetahuan dan keterampilan, sedangkan aspek sekunder berupa miskinnya jaringan sosial, sumber-sumber keuangan dan informal seperti kekurangan gizi, air, perumahan, perawatan kesehatan yang kurang baik dan pendidikan yang rendah. Kelompok penduduk miskin yang berada di pedesaan dan pekotaan, umumnya berprofesi sebagai buruh tani, petani gurem, pedagang kecil, nelayan, pengrajin kecil, buruh pedagang kaki lima, pegadang asongan, pemulung, gelandangan dan pengemis serta pengangguran.

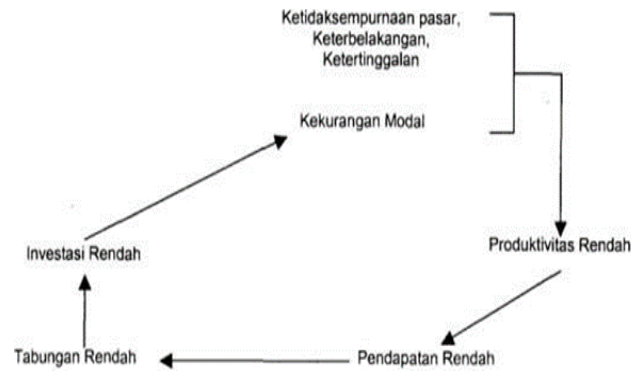
Menurut Hadar (2004) Kelompok miskin ini akan menimbulkan problema yang terus berlanjut bagi kemiskinan kultural dan struktural apabila tidak ditangani secara serius, terutama untuk generasi berikutnya. Pada umumnya, penduduk yang tergolong miskin adalah golongan residual yaitu kelompok masyarakat yang belum tersentuh oleh berbagai kebijakan pemerintah yang terkonsentrasikan secara khusus, seperti melalui IDT, namun secara umum sudah melalui PKT, Program Bimas, program Peningkatan Pendapatan Petani dan Nelayan, NKKBS, KUD, PKK didesa. Golongan ini termasuk sulit disentuh, karena kualitas sumber daya yang rendah sehingga kurang memanfaatkan fasilitas, termasuk faktor-faktor produksi. Golongan ini termasuk sulit disentuh

karena kualitas sumber daya yang rendah sehingga kurang memanfaatkan fasilitas, termasuk faktor-faktor produksi,

2. Faktor-faktor Kemiskinan

Tidak sedikit penjelasan mengenai faktor-faktor kemiskinan, berbagai penjelasan mengidentifikasi faktor-faktor kemiskinan seperti Kartasmita (1996) yang mengidentifikasi kemiskinan dari sisi ekonomi, pertama, secara mikro kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamam pola kepemilikan sumber daya yang menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang. Penduduk miskin hanya memiliki sumber daya dalam jumlah terbatas dan kualitasnya rencah. Kedua, kemiskinan muncul akibat perbedaan dalam kualitas sumber daya manusia. Kualitas sumber daya manusia yang rendah berarti produktivitasnya rendah, yang pada gilirannya upahnya rendah. Rendahnya kualitas sumberdaya manusia ini karena rendahnya pendidikan, nasib yang kurang beruntung, adanya diskriminasi atau karena keturunan. Ketiga, kemiskinan muncul akibat perbedaan akses dalam modal.

Ketiga penyebab kemiskinan tersebut pada akhirnya bermuara pada teori lingkaran setan kemiskinan yang dikemukakan oleh Suryahadi (2020) yaitu adanya keterbelakangan, ketidaksempurnaan pasar, dan kurangnya modal menyebabkan rendahnya produktifitas. Rendahnya produktifitas mengakibatkan rendahnya pendapatan yang mereka terima. Rendahnya pendapatan akan berimplikasi pada rendahnya tabungan dan investasi. Rendahnya investasi berakibat pada keterbelakangan dan seterusnya. Lingkaran ini sebagaimana dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



Gambar 2. Faktor-faktor Lingkaran Kemiskinan

Negara berkembang hingga kini masih memiliki ciri-ciri terutama sulitnya mengelola pasar dalam negasinya menjadi pasar persaingan yang lebih sempurna. Ketika mereka tidak dapat mengelola pembangunan ekonomi, maka kecenderungan kekurangan modal dapat terjadi, diikuti dengan rendahnya produktivitas, turunnya pendapatan riil, rendahnya tabungan dan investasi mengalami penurunan sehingga melingkarulangi menuju keadaan kurangnya modal (Utomo et al., 2014). Demikian seterusnya, berputar, oleh sebab itu setiap usaha memerangi kemiskinan seharusnya diarahkan untuk memotong lingkaran dan perangkap kemiskinan ini.

Penjelasan lain seperti Hikmat (2004) mengemukakan faktor kemiskinan berkaitan dengan budaya hidup ditengah masyarakat, ketidakadilan dalam pemilikan faktor produksi dan penggunaan model pendekatan pembangunan yang dianut oleh suatu negara. Semetaran itu Hadar (2004) menegaskan faktor terjadinya kemiskinan terjadi karena lilitan kemiskinan hilangnya hak atau kekayaan yang sukar atau kembali, mungkin disebabkan desakan kebutuhan yang melampaui ambang batas kekuatannya, misalnya pengeluaran yang sudah diperhitungkan sebelumnya, namun jumlahnya sangat

besar, atau tiba-tiba dihadapkan pada krisis yang hebat. Lazimnya kebutuhan yang mendorong seseorang yang terlilit kemiskinan, berkaitan dengan lima faktor seperti kewajiban adat, musibah, ketidakmampuan fisik, pengeluaran tidak produktif dan pemerasan.

Uraian tersebut menunjukkan bahwa faktor terjadinya kemiskinan adalah adanya faktor internal berupa kebutuhan yang segera harus terpenuhi namun tidak memiliki kemampuan yang cukup dalam berusaha mengelola sumber daya yang dimiliki seperti keterampilan memadai, pendidikan yang minim dan sebagainya

Faktor lainnya seperti faktor eksternal berupa bencana alam seperti krisis ekonomi, serta tidak adanya pemihakan berupa kebijakan yang memberikan kesempatan dan peluang bagi masyarakat miskin. Meskipun berbagai pendapat dikemukakan oleh sejumlah ahli, setidaknya terdapat dua macam teori yang lazim dipergunakan untuk menjelaskan akar kemiskinan yaitu teori marginalisasi dan teori ketergantungan. Teorimarginalisasi, kemiskinan dianggap sebagai akibat dari tabiat apatis, fatalisme, tergantung, rendah diri, pemboros dan konsumtif serta kurang berjiwa wiraswasta.

3. Penanggulangan Kemiskinan

Pemikiran mengenai kemiskinan berubah sejalan dengan berjalannya waktu, tetapi pada dasarnya berkaitan dengan ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar (Daud & Marini, 2019). Kemiskinan menunjukkan situasi serba kekurangan yang terjadi bukan karena dikehendaki oleh orang miskin tersebut, melainkan karena tidak bisa dihindari dengan kekuatan yang dimilikinya

(Evers & Hans, 1988). Penyebab kemiskinan dapat terjadi karena kondisi alamiah dan ekonomi, kondisi struktural dan sosial, serta kondisi kultural (budaya).

Kemiskinan alamiah dan ekonomi timbul akibat keterbatasan sumber daya alam, manusia, dan sumberdaya lain sehingga peluang produksi relatif kecil dan tidak dapat berperan dalam pembangunan. Kemiskinan struktural dan sosial disebabkan hasil pembangunan yang belum merata, tatanan kelembagaan dan kebijakan dalam pembangunan (Saragi et al., 2021).

Sedangkan kemiskinan kultural (budaya) disebabkan sikap atau kebiasaan hidup yang merasa kecukupan sehingga menjebak seseorang dalam kemiskinan (Infitah et al., 2019). Penyebab timbulnya kemiskinan berasal dari dalam dan dari luar penduduk miskin. Penyebab dari dalam diantaranya rendahnya kualitas sumber daya manusia dan sikap individu tersebut. Sedangkan penyebab dari luar adalah keterbatasan sumber daya alam, tatanan sosial dan kelembagaan dalam masyarakat, kebijakan pembangunan, kesempatan kerja yang terbatas dan persaingan yang menyebabkan terpinggirnya penduduk miskin. Jenis kemiskinan dapat dibedakan berdasarkan pola waktunya yaitu: (1) *persistent poverty*, yaitu kemiskinan yang telah kronis atau turun temurun yang diantaranya merupakan daerah kritis sumber daya alam atau terisolasi; (2) *cyclical poverty*, yaitu kemiskinan yang mengikuti pola siklus ekonomi secara keseluruhan. (3) *seasonal poverty*, yaitu kemiskinan musiman seperti sering dijumpai kasus-kasus nelayan dan petani tanaman pangan. (4) *accidental poverty*, yaitu kemiskinan karena bencana alam atau dampak dari suatu kebijakan (Beni & Manggu, 2020).

Kemiskinan juga dapat dibedakan melalui perbandingan dengan suatu ukuran tertentu atau dengan anggota/kelompok masyarakat lainnya. Ukuran kemiskinan absolut dengan menggunakan garis kemiskinan atau kondisi kondisi tertentu yang mencerminkan situasi kemiskinan (Luthfi, 2019).

Sedangkan ukuran kemiskinan relatif dengan membandingkan dengan jumlah keseluruhan kelompok dan dapat digambarkan melalui Kurva Lorentz dan menggunakan Gini Ratio untuk mengetahui besarnya kesenjangan. Strategi pengentasan kemiskinan yang dikemukakan oleh Bank Dunia, bahwa setiap dekade strategi pengentasan kemiskinan mengalami perkembangan mulai dari penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan, pengembangan kesehatan dan pendidikan, perlindungan sampai dengan pemberdayaan kaum miskin (Gultom et al., 2020).

Strategi memerangi kemiskinan yang dikemukakan oleh Hadar (2004) meliputi: (1) strategi dalam jangka pendek yaitu memindahkan sumberdaya-sumberdaya kepada kaum miskin dalam jumlah yang memadai. Perbaikan keadaan kemiskinan dalam jangka pendek diantaranya menciptakan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan, dan memperbaiki distribusinya; (2) Strategi jangka panjang dengan menumbuhkan swadaya setempat. Perbaikan dalam jangka panjang dengan memperbaiki dan memenuhi harkat hidup secara individual dan sosial yang bermartabat. Strategi Pengentasan Kemiskinan yang dilaksanakan oleh Pemerintah dapat dibagi menjadi dua bagian besar, pertama melindungi keluarga dan kelompok masyarakat yang mengalami kemiskinan sementara, dan

kedua membantu masyarakat yang mengalami kemiskinan kronis dengan memberdayakan dan mencegah terjadinya kemiskinan baru.

Strategi tersebut selanjutnya dituangkan dalam tiga program yang langsung diarahkan pada penduduk miskin, menurut Sasmita (2021). yaitu: (1) penyediaankebutuhan pokok; 2) pengembangan sistem jaminan sosial; dan 3) pengembangan budaya usaha. Selain itu penduduk miskin mempunyai strategi sendiri untuk menanggulangi kemiskinannya. Strategi yang ditempuh yaitu dengan pinjam dari lembaga informal, menambah jam kerja, anggota keluarga ikut bekerja, merantau atau berhemat (A. Mandolang et al., 2019). Konsep kebijakan yang digunakan pemerintah dalam program pengentasan kemiskinan dapat dibedakan berdasarkan tradisi dan pendekatan perencanaan yang melandasinya. Tradisi perencanaan menurut Kartasasmita (1996) setidaknya terdiri empat tipe yaitu: (1) perencanaan sebagai reformasi sosial (social reform), bahwa negara menyusun dan merencanakan berbagai arahan dan pedoman pembangunan untuk diikuti dan dilaksanakan oleh masyarakat;(2) perencanaan sebagai analisis kebijakan (policy analysis), bahwa para penentu kebijakan (pemerintah dan pihak terkait lainnya) berdasarkan analisis data yang ilmiah menyusun dan merencanakan berbagai arahan dan pedoman pembangunan yang dapat diterima dan dilaksanakan oleh masyarakat; (3) perencanaan sebagai pembelajaran sosial (social learning), bahwa pengetahuan perencanaan diperoleh lewat pengalaman dan disempurnakan lewat praktik (learning bydoing), perencanaan serta pelaksanaan pembangunan dijalankan bersama-sama dengan

masyarakat dengan bimbingan dari ahli; dan (4) perencanaan sebagai mobilisasi sosial (social mobilization), bahwa perencanaan pembangunan harus dilaksanakan oleh masyarakat dan digerakkan dengan berbagai konsep/ideologi yang sudah tertanam di dalam jiwa dan kebudayaan mereka.

Sedangkan jenis-jenis program pengentasan kemiskinan yang dilaksanakan pemerintah dapat dilihat berdasarkan model pembangunan yang mendasari program- program tersebut untuk melihat titik berat strategi yang dijalankan program tersebut. Model pembangunan yang dianut negara berkembang secara garis besar terbagi dalam empat model pembangunan. Model pembangunan I menitik beratkan pada pertumbuhan pendapatan nasional. Model pembangunan II menitikberatkan pada pemerataan dan pemenuhan kebutuhan pokok/dasar (Infitah et al., 2019). Model pembangunan III berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui keikutsertaan masyarakat dan kelompok sasaran dalam menentukan kebutuhan dan partisipasi dalam proses pembangunan. Sedangkan model pembangunan IV menitikberatkan pada peningkatan daya saing untuk menghadapi era globalisasi dan era otonomi daerah. Evaluasi terhadap program pengentasan kemiskinan diantaranya dapat dilakukan terhadap pendekatan perencanaan, model pembangunan yang digunakan dan pelaksanaan program tersebut (Pertwi et al., 2019). Kriteria yang digunakan untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program pengentasan kemiskinan meliputi: penentuan sasaran dan data yang digunakan untuk menentukan sasaran; peranan pemerintah daerah, masyarakat umum dan penerima

sasaran program; dan implementasi program di tingkat pemerintah dan masyarakat

Tetapi yang menjadi permasalahan dalam diversifikasi usaha adalah masalah memasarkan produk tersebut. Pemerintah daerah diharapkan dapat menjajaki jejaring pemasaran dengan pihak swasta terkait atau membangun berbagai kemungkinan kerjasama dengan lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang bergerak dalam menggalang pemasaran produk pertanian/non pertanian (Muttakin & Fatwa, 2021). Kemiskinan merupakan cerminan entitas sosial dan ekonomi mayoritas penduduk di perdesaan yang terkait erat dengan ketimpangan yang sebagian besar terjadi akibat bekerjanya sistem kapitalisme yang mengkooptasi perdesaan Indonesia sejak masa kolonialisme.

4. Teori Efektifitas Program

Kata efektif dari bahasa Inggris *effective* artinya berhasil. Sesuatu yang dilakukan dengan baik. Efektivitas sebagai tingkat pencapaian organisasi jangka pendek dan jangka panjang. Efektivitas memiliki arti berhasil atau tepat guna. Efektif merupakan kata dasar, sementara kata sifat efektif adalah efektivitas (Kusuma & Akbar, 2021). Menurut Effendy (1988) efektivitas adalah sebagai berikut: Komunikasi yang prosesnya mencapai tujuan yang direncanakan sesuai dengan biaya yang dianggarkan, waktu yang ditetapkan dan jumlah personil yang ditentukan. Pengertian efektivitas dengan menggunakan pendekatan sistem yaitu seluruh siklus input-proses- output, tidak hanya output saja dan hubungan timbal balik antara organisasi dan lingkungannya (Sari & Nadjib, 2019).

Efektivitas dapat didefinisikan juga sebagai pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan jumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya (Fitriani, 2020). Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektivitasnya. Terdapat berbagai definisi efektifitas, diantaranya: Pertama, efektivitas Individu, yaitu didasarkan pada pandangan dari segi individu yang menekankan pada hasil karya karyawan atau anggota dari organisasi. Kedua, Efektivitas Kelompok yaitu adanya pandangan bahwa pada kenyataan individu saling bekerja sama dalam kelompok. Jadi efektivitas kelompok merupakan jumlah kontribusi dari semua anggota kelompoknya. Ketiga, efektivitas organisasi, yaitu terdiri dari efektivitas individu dan kelompok. Melalui pengaruh sinergitas, organisasi mampu mendapatkan hasil karya yang lebih tinggi tingkatannya dari pada jumlah hasil karya tiap-tiap baginya (Daud & Marini, 2019).

Efektivitas dalam kegiatan organisasi dapat dirumuskan sebagai tingkat perwujudan sasaran yang menunjukkan sejauh mana sasaran telah dicapai. Efektivitas pada umumnya di pandang sebagai tingkat pencapaian tujuan opratif dan operasional.

Dengan demikian pada dasarnya efektivitas adalah tingkat pencapaian tujuan atau sasaran organisasional sesuai yang ditetapkan (Daud & Marini, 2019). Efektivitas adalah seberapa baik pekerja yang dilakukan, sejauh mana seseorang menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan. Ini dapat diartikan, apabila sesuatu pekerjaan

dapat dilakukan dengan baik sesuai dengan yang direncanakan, dapat dikatakan efektif tanpa memperhatikan waktu, tenaga dan lainnya. Disimpulkan bahwa konsep tingkat efektivitas organisasi menunjukkan pada tingkat organisasi melaksanakan kegiatan atau fungsi-fungsi sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan menggunakan secara optimal alat-alat dan sumber-sumber yang ada (Luthfi, 2019). Ini berarti bahwa pembicaraan mengenai efektivitas organisasi menyangkut dua aspek yaitu tujuan organisasi dan pelaksanaan fungsi atau cara untuk mencapai tujuan tersebut, menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan.

Hal ini dapat diartikan, apabila sesuatu pekerjaan dapat dilakukan dengan baik sesuai dengan yang direncanakan, dapat dikatakan efektif tanpa memperhatikan waktu, tenaga dan lainnya. Disimpulkan bahwa konsep tingkat efektivitas organisasi menunjukkan pada tingkat organisasi melaksanakan kegiatan atau fungsi-fungsi sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan menggunakan secara optimal alat-alat dan sumber-sumber yang ada (Daud & Marini, 2019). Ini berarti bahwa pembicaraan mengenai efektivitas organisasi menyangkut dua aspek yaitu tujuan organisasi dan pelaksanaan fungsi atau cara untuk mencapai tujuan tersebut. Adapun penelitian ini menggunakan efektivitas menurut Steers (Steers, 2003) untuk mengukur efektivitas program keluarga harapan (PKH) dalam menanggulangi kemiskinan pasca pandemi Covid-19 di Kabupaten Purbalingga, diantaranya: Pertama, sosialisasi program sebagai upaya pendistribusian informasi kepada kelompok manfaat. Kedua, ketepatan pelaksanaan program sebagai bentuk kesesuaian antara tujuan dan

pelaksanaan program. Ketiga, pemantauan program sebagai bentuk monitoring terhadap pelaksanaan program.

G. Definisi Konseptual

Definisi konseptual merupakan abstraksi yang diungkapkan dalam kata kata sehingga dapat membantu pemahaman terhadap suatu hal, bahkan dianggap mampu untuk menggambarkan sesuatu dalam karakteristik abstrak dan hubungannya dengan entitas konseptual lainnya. Adapun definisi konseptual dalam penelitian dapat dilihat dibawah ini:

1. Kemiskinan

Berdasarkan pengertian kemiskinan dapat dipahami bahwa kemiskinan merupakan situasi yang serba terbatas dan terjadi bukan atas kehendak orang yang bersangkutan. Masyarakat dapat dikatakan miskin apabila ditandai oleh rendahnya pendidikan, produktivitas kerja, pendapatan, kesehatan dan gizi serta kesejahteraan hidupnya yang menunjukkan lingkaran ketidakberdayaan.

2. Faktor-Faktor Kemiskinan

Kemiskinan difaktori oleh adanya perbedaan dalam kualitas sumber daya manusia. Kualitas sumber daya manusia yang rendah berarti produktivitasnya rendah, yang pada gilirannya upahnya rendah. Rendahnya kualitas sumberdaya manusia ini karena rendahnya pendidikan, nasib yang kurang beruntung, adanya diskriminasi atau karena keturunan. Ketiga, kemiskinan muncul akibat perbedaan akses dalam modal

3. Penanggulangan Kemiskinan

Penanggulangan kemiskinan dapat dilakukan dengan memperbaiki keadaan kemiskinan dalam

jangka pendek diantaranya menciptakan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan, dan memperbaiki distribusinya..

4. Efektifitas Program

Pengertian efektifitas program dapat diketahui bahwa suatu program dikatakan efektif apabila tingkat pencapaian tujuan atau sasaran organisasional sesuai yang ditetapkan.

H. Definisi Operasional

Definisi operasional yaitu pemberian atau penetapan makna bagi suatu variabel dengan spesifikasi kegiatan atau pelaksanaan atau operasi yang dibutuhkan untuk mengukur, mengkategorisasi atau memanipulasi variabel. Definisi operasional merupakan seperangkat petunjuk yang lengkap tentang apa yang harus diamati dan mengukur suatu variabel atau konsep untuk menguji kesempurnaan. Adapun penelitian ini menggunakan efektivitas menurut Steers untuk mengukur efektivitas program keluarga harapan (PKH) dalam menanggulangi kemiskinan pasca pandemi Covid-19 di Kabupaten Purbalingga. Landasan teori efektifitas membantu penelitian dalam mengetahui serangkaian upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Purbalingga melalui PKH telah efektif atau belum. Oleh sebab itu, indikator untuk mempermudah peneliti dalam menganalisis penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. Definisi Operasional Penelitian.

NO	Variabel Teori	Indikator Teori	Parameter
1	Efektivitas Program (Steers, 2003)	Sosialisasi Program	<ol style="list-style-type: none"> Adanya Sosialisasi Program Keluarga Harapan (PKH) pelaksanaan kepada kelompok sasaran Adanya kolaborasi dengan pihak lain dalam penerapan Program Keluarga Harapan (PKH)
			<ol style="list-style-type: none"> Sosialisasi Program Keluarga Harapan (PKH) dengan sejumlah stakeholder lainnya
		Ketepatan Program	<ol style="list-style-type: none"> Adanya ketepatan waktu dengan perencanaan pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Adanya Kesesuaian Program Keluarga Harapan (PKH) dengan sasaran target
		Pemantauan Program	<ol style="list-style-type: none"> Melakukan monitoring dan evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH)

I. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Menurut Creswell (2014), jenis penelitian kualitatif merupakan metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang dianggap oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial. Adapun definisi studi kasus dalam penelitian ini merupakan strategi untuk menyelidiki secara cermat suatu hal dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari para partisipan, menganalisis data secara induktif dan menafsirkan makna data (Al-Hamdi et al., 2020). Jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan

studi kasus dianggap memudahkan penelitian ini dalam mengeksplor lebih dalam efektivitas program keluarga harapan pasca pandemi Covid-19 di Kabupaten Purbalingga.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di instansi Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purbalingga. Adapun justifikasi pemilihan lokasi dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4. Lokasi Penelitian

No	Nama Lokasi	Justifikasi Pemilihan Lokasi
1.	Kecamatan Purbalingga	Salah satu lokasi penerima Program Keluarga Harapan di Kabupaten Purbalingga
2.	Kecamatan Kutasari	Salah satu lokasi penerima Program Keluarga Harapan di Kabupaten Purbalingga
3.	Kecamatan Bukateja	Salah satu lokasi penerima Program Keluarga Harapan di Kabupaten Purbalingga

3. Unit Analisa

Unit analisa merupakan salah satu komponen dari penelitian kualitatif. Adapun unit analisa data atau objek dari penelitian adalah Efektivitas Program Keluarga Harapan dalam Penanggulangan Kemiskinan Pasca Pandemi Covid-19.

4. Data dan Sumber Data

1) Data Primer

Penelitian ini mengelompokan teknik pengumpulan data kedalam dua bagian, yakni: Pertama, teknik pengumpulan data secara primer atau sumber data diperoleh secara langsung melalui wawancara dari berbagai narasumber yang telah

diidentifikasi dapat memenuhi target data yang dibutuhkan. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai narasumber yang berhasil teridentifikasi dan dianggap dapat memenuhi target data yang dibutuhkan diantaranya adalah: Pertama, Koordinator PKH Dinas Sosial Kabupaten Purbalingga, Kedua, tiga koordinator Pendamping Program Keluarga Harapan (PPKH) di Kecamatan Purbalingga, Kecamatan, Bukateja dan Kecamatan Kutasari. Ketiga, Kelompok Penerima Manfaat (KPM). Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan wawancara mendalam kepada narasumber. Adapun narasumber dalam penelitian ini yaitu Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purbalingga. Selanjutnya teknik pengumpulan data secara sekunder atau sumber data diperoleh dari hasil analisis pustaka yang dihimpun serta dianalisis dari berbagai sumber seperti artikel ilmiah, media masa, dokumen peraturan daerah Kabupaten Purbalingga dalam menerapkan program keluarga harapan. Adapun lebih detailnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 5. Data Primer Penelitian

No	Data Primer	Sumber Data	Teknik Pengumpulan Data
1	Mengetahui proses sosialisasi, pendampingan dan distribusi bantuan kepada masyarakat	Koordinator PKH Dinas Sosial Kabupaten Purbalingga	Wawancara Mendalam
2	Mengetahui proses sosialisasi, pendampingan dan distribusi bantuan kepada masyarakat	Koordinator Tim Pendamping PKH (PPKH) Kec. Purbalingga	Wawancara Mendalam
3	Mengetahui proses sosialisasi, pendampingan dan distribusi bantuan kepada masyarakat	Koordinator Tim Pendamping PKH (PPKH) Kec. Kutasari	Wawancara Mendalam
4	Mengetahui proses sosialisasi, pendampingan dan distribusi bantuan kepada masyarakat	Koordinator Tim Pendamping PKH (PPKH) Kec. Bukateja	Wawancara Mendalam
5	Mengetahui efektifitas proses sosialisasi, pendampingan dan distribusi bantuan kepada masyarakat	Kelompok Penerima Manfaat (KPM) PKH	Wawancara Mendalam

2) Data Sekunder

Selanjutnya penelitian ini menggunakan data sekunder untuk memperkuat temuan-temuan yang dilakukan pada studi terdahulu. Data sekunder yang diperoleh dalam penelitian ini berasal dari internet, jurnal-jurnal, arsip-arsip

Tabel 6. Data Sekunder Penelitian

No	Data Sekunder	Sumber Data	Teknik Pengumpulan Data
1	Analisis sekunder artikel ilmiah yang relevan dengan penerapan program keluarga harapan	Artikel Ilmiah	Dokumentasi
2	Analisis sekunder media massa yang relevan dengan penerapan program keluarga harapan di Kabupaten Purbalingga	Media Massa	Dokumentasi
3	Rekap Data Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Purbalingga	Dinas Sosial Kabupaten Purbalingga	Dokumentasi

5. Teknik Pengumpulan Data

1) Wawancara

Tabel 7. Wawancara Narasumber

No	Narasumber	Jumlah Narasumber
1.	Koordinator PKH Dinas Sosial Kabupaten Purbalingga	1 Orang
2.	Koordinator Tim Pendamping PKH (PPKH) Kec. Purbalingga	1 Orang
3.	Koordinator Tim Pendamping PKH (PPKH) Kec. Kutasari	1 Orang

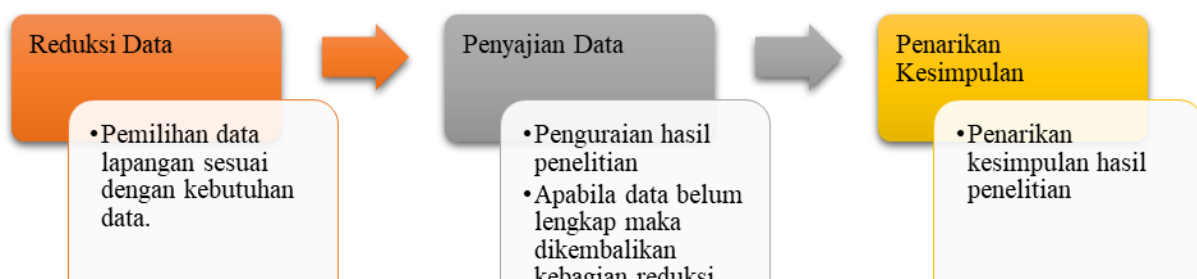
4.	Koordinator Tim Pendamping PKH (PPKH) Kec. Bukateja	1 Orang
5	Kelompok Penerima Manfaat (KPM) PKH	3 Orang

2) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan data yang sudah ada dan merupakan dokumen yang telah disimpan oleh lembaga atau instansi guna keperluan untuk perekapan.

6. Teknik Analisa Data

Data yang berhasil dikolektifkan akan dianalisis secara interaktif. Menurut Miles & Hubermans (Miles & Huberman, 2014) teknik analisis interaktif merupakan aktivitas analisis yang dilakukan secara terus menerus sampai data yang didapatkan menjadi tuntas dan akhirnya data tersebut jenuh. Proses analisis dilakukan secara tiga tahapan analisis, diantaranya: Pertama, reduksi data yakni mengumpulkan data yang berhasil dikolektifkan sesuai dengan kebutuhan data. Kedua, penyajian data yakni menguraikan data penelitian yang berhasil direduksi. Ketiga, penarikan kesimpulan. Adapun alur metode penelitian dapat pada gambar dibawah ini:



Gambar 3. Alur Analisis Data Penelitian